

**ANALISIS DANA PERIMBANGAN, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, DAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

CHOLLY FATUN NISA

NPM 2111021058



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALISIS DANA PERIMBANGAN, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, DAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI INDONESIA**

Oleh

CHOLLY FATUN NISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DANA PERIMBANGAN, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh

CHOLLY FATUN NISA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan *foreign direct investment* terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Studi ini mengaplikasikan pendekatan regresi data panel untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam rentang waktu sepuluh tahun, yaitu dari 2014 hingga 2023, dengan cakupan wilayah sebanyak 34 provinsi. Ketiga variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan *foreign direct investment*. Sementara itu, ketimpangan pembangunan antar daerah digunakan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan, dan *foreign direct investment* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan.

Kata Kunci: Indeks Jaime Bonet, Ketimpangan Pembangunan Daerah, Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, *Foreign Direct Investment*

ABSTRACT

ANALYSIS OF EQUALIZATION FUNDS, LABOR FORCE PARTICIPAN RATE, AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON REGIONAL DEVELOPMENT INEQUALITY IN INDONESIA

By

CHOLLY FATUN NISA

This study aims to analyze the effect of equalization funds, labor force participation rate, and foreign direct investment on regional development inequality in Indonesia. This study applies a panel data regression approach to examine the relationship between variables over a ten-year time span, from 2014 to 2023, with a coverage area of 34 provinces. The three independent variables analyzed in this study include equalization funds, labor force participation rate, and foreign direct investment. Meanwhile, inter-regional development inequality is used as the dependent variable. The results show that equalization funds, and foreign direct investment have a negative and significant influence on regional development inequality. In contrast, the labor force participation rate shows a negative but insignificant effect.

Keywords: Jaime Bonet Index, Regional Development Inequality, Equalization Funds, Labor Force Participation Rate, Foreign Direct Investment

Judul Skripsi : Analisis Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan *Foreign Direct Investment* Terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Chosly Fatun Nisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2111021058

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Arvina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Arvina Ratih Y.T., S.E., M.M., is placed over the 'MENGETAHUI' section.

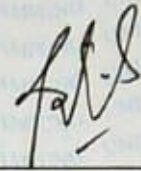
Dr. Arvina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

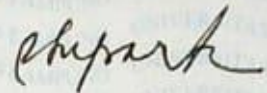
Ketua

: **Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.**



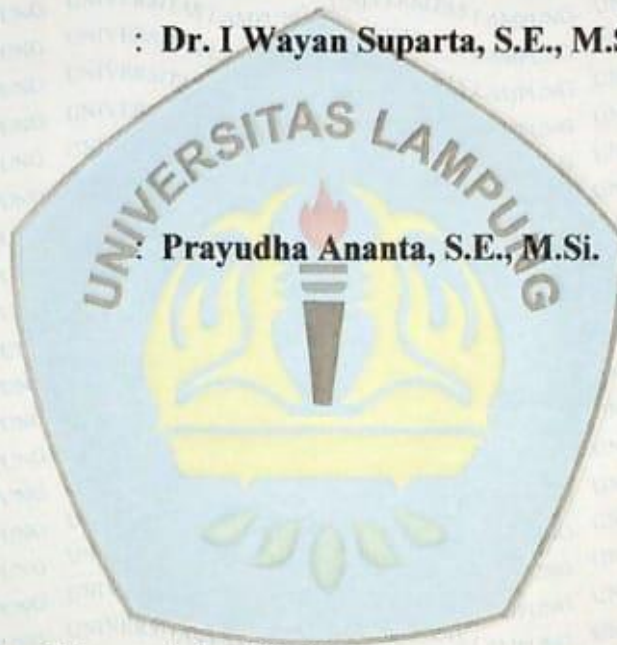
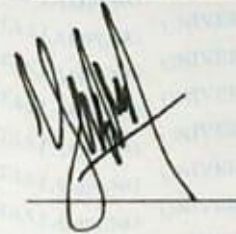
Penguji I

: **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**



Penguji II

: **Prayudha Ananta, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Mei 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cholly Fatun Nisa

NPM : 2111021058

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan *Foreign Direct Investment* Terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah Di Indonesia” telah ditulis dengan sungguh- sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025
Penulis


Cholly Fatun Nisa

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cholly Fatun Nisa, lahir di Kota Metro, Lampung pada tanggal 25 Mei 2002. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Lis Zubaidah. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari jenjang Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tempuran dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah pertama dilanjutkan di SMP Negeri 9 Metro hingga lulus pada tahun 2017, kemudian diteruskan di jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Metro, dan berhasil meraih kelulusan pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain *Economic and Business Entrepreneur Club* serta Pilar Ekonomi

Sebagai bagian dari kewajiban akademik, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode I tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Selain itu, penulis juga melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro pada tahun yang sama.

MOTTO

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

*“The Scary news is, you are on your own now. But the cool news is, you are on
your own now”*

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan pencapaian selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Skripsi ini didedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Suherman dan Ibu Lis Zubaidah, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa kasih sayang, dukungan, materi dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada adik tercinta Khaila Aulia Nisa yang senantiasa memberi semangat dan tawa dalam hari-hari penulis. Tak lupa, ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada para dosen, teman-teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Kehadiran mereka sangat berarti dalam menyempurnakan perjalanan akademik penulis.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas Lampung, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi langkah awal dalam kontribusi penulis untuk kemajuan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, pertolongan, serta kemudahan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Foreign Direct Investment Terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah Di Indonesia”*** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berjasa dalam memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis, yaitu:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta ilmu yang sangat berarti dan membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian studi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suherman dan Ibu Lis Zubaidah yang telah menyayangi, membimbing, dan mendoakan. Dua orang yang menjadi motivasi tertinggiku, yang menjadi alasanku menyelesaikan studi ini.
10. Adikku tersayang Khaila Aulia Nisa, yang telah memberikan semangat dan tawa dalam hari-hari penulis
11. Sahabat Kosan Teratai Oren, Septa, Bila, Sisil, Mba Icak, Aulia, Kharizky, Sabilal, Gusti, dan Kakak- kakak yang telah menjadi tempat curhat hari-hari penulis, menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih telah memberikan dukungan yang sangat berharga, membantu dalam segala hal, dan mengucapkan semangat setiap hari.
12. Sahabat rantau Septiana Tri Susanti, yang selalu bisa diandalkan dalam segala hal. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dalam hari hari penulis.
13. Sahabat baik Wina Clara Putri Dewita, yang selalu ada jika penulis membutuhkan bantuan. Terima kasih sudah mau berproses bersama- sama.
14. Sahabat kampus, Dea dan Puput. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, dan menjadi sahabat yang sangat menyenangkan saat kuliah.
15. Teman seperjuangan skripsi, Devita, Anatasia, Firda, Wahyuni, Dinda, Nurfa, Nisa, dan Salma. Terima kasih telah berbagi ilmu, dan informasi dalam penuntasan skripsi ini.

16. Cegil KKN, Nazwa, Frissa, Risma, Amanda. Terima kasih karna sudah selalu kompak dalam menjalani 36 hari selama KKN.
17. Sahabat SMA, Dinda, Vicha, Widi, dan Andhara yang telah menjadi tempat pulang untuk melepas penat saat bertemu.
18. Sahabatku Iin Nuraini, dan Rani yang selalu mendukung dan selalu mendengarkan banyak cerita, curhat dan berkeluh kesah.
19. Arya Mohan, yang selalu membuat penulis tertawa, terbang, dan jantungan setiap sore pada waktu itu.
20. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman dari Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Ucapan terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
21. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas setiap bantuan dan waktu yang telah diberikan sebagai dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. dengan segala Ridho-nya memberi balasan untuk segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Aamiin ya Rabbal'alam.

Bandar Lampung, 17 April 2025

Penulis

Cholly Fatun Nisa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Pembangunan Regional.....	17
2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah.....	18
2.1.3 Konsep Peran Pemerintah Daerah	23
2.1.4 Desentralisasi Fiskal	24
2.1.5 Dana Perimbangan.....	26
2.1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	29
2.1.7 Foreign Direct Investment (FDI)	29
2.2 Tinjauan Empiris	32
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2 Sumber dan Data Penelitian	37
3.3 Definisi Oprasional Variabel.....	38
3.4 Metode Analisis.....	40
3.5 Metode Estimasi	41
3.6 Prosedur Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.2 Pengujian Spesifikasi Model	50
4.2.1 Uji Chow.....	50
4.2.2 Uji Hausman	51
4.3 Model Regresi Data Panel	52
4.4 Uji Asumsi Klasik	55
4.4.1 Uji Normalitas.....	56
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	56
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.5 Pengujian Hipotesis	58
4.5.1 Uji t	58
4.5.2 Uji F.....	59
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi R ² (R Squared)	60
4.6 Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris.....	32
Tabel 3. 1 Sumber dan Data Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel.....	52
Tabel 4. 5 Hasil Individual Effect.....	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolineritas	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Jaime Bonet di Indonesia Tahun 2014-2023	4
Gambar 1. 2 Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2023.....	8
Gambar 1. 3 TPAK Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2023	11
Gambar 1. 4 Foreign Direct Invesment Indonesia Tahun 2014- 2023.....	13
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perhitungan Indeks Jaime Bonet.....	77
Lampiran 2 Data Variabel Bebas dan Variabel Terikat	86
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif.....	95
Lampiran 4 Uji Penentuan Model.....	96
Lampiran 5 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)	98
Lampiran 6 Hasil Individual Effect.....	99
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik	100
Lampiran 8 Uji Hipotesis	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di Indonesia, pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan akses terhadap infrastruktur yang memadai. Menurut Todaro & Smith (2020) pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar antara daerah maju dan daerah tertinggal, sehingga menimbulkan disparitas dalam kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi regional, mengingat pentingnya peran pembangunan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, kualitas kehidupan, serta status sosial dan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan dan produktivitas, tetapi juga melibatkan perbaikan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan kerja yang lebih luas dan merata. Hal tersebut dapat dicapai melalui serangkaian perubahan berkelanjutan yang dirancang secara sistematis untuk memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki daya saing yang lebih tinggi, memperkuat otonomi daerah agar dapat mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan secara lebih mandiri, serta mendorong modernisasi melalui transformasi struktural (Sumodiningrat, 1999).

Namun, meskipun upaya pembangunan telah dilakukan, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan. Perbedaan potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia antar daerah telah menyebabkan ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Anwar et al. (2023). Penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan tersebut Anwar et al. (2023). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini melalui kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia (Habibi, 2024).

Ketimpangan pembangunan daerah yang terus berlanjut berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan nyata dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi di berbagai wilayah. Daerah-daerah yang tertinggal seringkali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, investasi, dan kapasitas pemerintahan. Studi yang dilakukan oleh Hill (2008) menyoroti bahwa tanpa kebijakan yang lebih terarah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, ketimpangan ini dapat semakin memperdalam perbedaan antara daerah kaya dan miskin. Pertumbuhan yang terlalu terkonsentrasi di wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa, menyebabkan daerah di luar Jawa tertinggal dari segi pembangunan.

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Hampir seluruh kebijakan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan keuangan daerah berada di tangan pemerintah pusat. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan reformasi di berbagai sektor, sistem ini mulai dipertanyakan, terutama terkait ketimpangan pembangunan antar daerah. Hal ini menimbulkan kesadaran akan pentingnya pembagian kewenangan dan sumber daya ke daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola kebutuhan pembangunan mereka (Rahmatunnisa, 2015)

Selanjutnya, pengakuan resmi terhadap 34 provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, semakin mempertegas komitmen negara untuk mendukung otonomi daerah yang lebih luas. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang pembagian wilayah, tetapi juga menjadi landasan penting dalam kebijakan pemerataan pembangunan. Provinsi-provinsi baru yang diakui dalam Undang-Undang tersebut, terutama di wilayah luar Jawa, memiliki karakteristik ekonomi dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda.

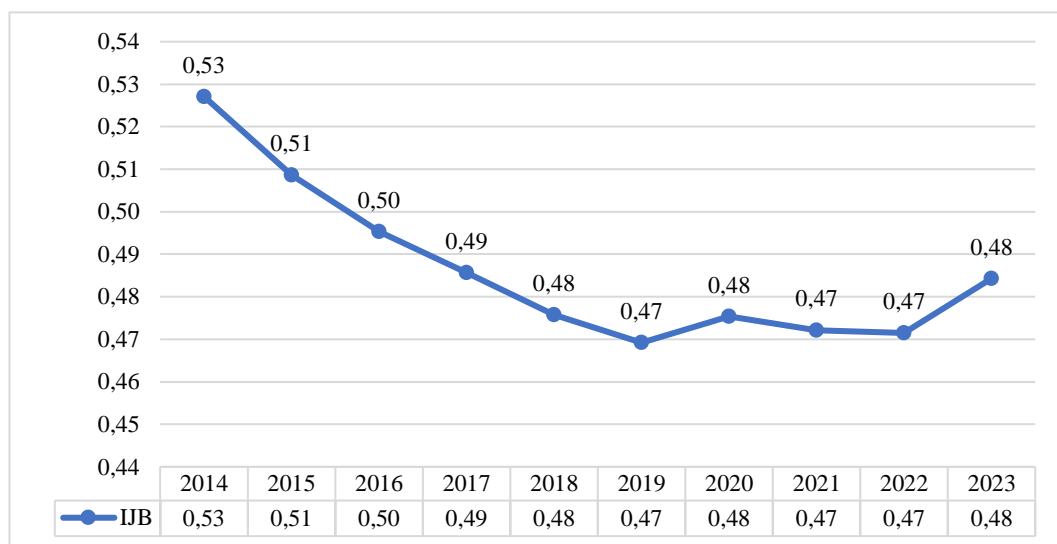
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam, menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa setiap daerah memperoleh manfaat yang sama dari proses pembangunan nasional. Akibatnya, beberapa pulau, terutama di wilayah barat Indonesia seperti Jawa dan Sumatra, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sedangkan pulau lain terutama di bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara, berkembang lebih lambat (Damara et al., 2024).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya antara daerah maju dan tertinggal dapat mengakibatkan disparitas kesejahteraan yang signifikan. Untuk mengukur tingkat ketimpangan tersebut, salah satu alat analisis yang sering digunakan adalah Indeks Williamson. Penerapan Indeks Williamson dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tayeb et al. (2022) mengindikasikan bahwa nilai Indeks Williamson antar provinsi di Indonesia selama periode 2000-2020 mencapai rata-rata 0,739, yang mengindikasikan ketimpangan pada taraf tinggi. Temuan ini menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah.

Indeks ketimpangan Jaime Bonet adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang berbeda. Indeks ini dikenal karena kemampuannya

dalam mengidentifikasi dan mengukur ketimpangan secara lebih spesifik antar daerah dalam suatu negara (Azizah & Suhartini, 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa indeks ketimpangan Jaime Bonet relevan dalam mengukur kesenjangan ekonomi. Bonet dan Meisel (2009) menjelaskan bahwa penggunaan indeks ini sangat bermanfaat dalam menganalisis ketimpangan antar wilayah di negara-negara berkembang. Bonet menemukan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan akses terhadap lapangan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan antar wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2023 (data diolah)

Gambar 1. 1 Indeks Jaime Bonet di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Indeks Jaime Bonet di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023. Terlihat bahwa indeks ini mengalami penurunan bertahap dari nilai 0,53 pada 2014 hingga mencapai titik terendah sebesar 0,47 pada 2019. Setelah itu, indeks cenderung stabil di angka 0,47 hingga 2022, sebelum akhirnya naik sedikit ke 0,48 pada 2023. Penurunan dan stabilitas pada level rendah ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas atau keberlanjutan pembangunan yang diukur oleh indeks ini. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan adanya masalah dalam menjaga konsistensi atau keberlanjutan upaya peningkatan kualitas yang diukur oleh Indeks Jaime Bonet.

Selain itu, penelitian yang relevan dalam mendukung penggunaan indeks Jaime Bonet menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa

kabupaten/kota yang mengalami ketimpangan yang sangat tinggi. Alfiansyah dan Budyanra (2020) menggunakan beberapa pendekatan pengukuran ketimpangan, termasuk indeks Jaime Bonet, untuk menunjukkan bahwa variabel seperti angka melek huruf (AMH) dan dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antardaerah, sedangkan variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Booth (1998) menyebutkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan sangat tinggi. Kebijakan pembangunan yang sentralistik ini, meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup pesat, justru berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pemerintah daerah di Indonesia adalah entitas administratif yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia . Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah berperan sebagai administrator yang memimpin dan mengoordinasikan berbagai fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Struktur pemerintahan daerah ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Dawud (2004) menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan model pemerintahan daerah di Indonesia, yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Sebelumnya, pengelolaan keuangan di Indonesia terpusat, dengan alokasi anggaran dan kebijakan fiskal yang ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Dalam sistem ini, pemerintah pusat mentransfer sebagian pendapatan, seperti Dana Perimbangan, ke daerah agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Prinsip desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, UU ini menggantikan regulasi sebelumnya dan bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat. Undang-undang ini juga mengatur reformasi dalam distribusi Dana Perimbangan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyederhanaan transfer ke daerah agar lebih efektif dalam mendorong pembangunan daerah.

Dengan adanya dana perimbangan ini, diharapkan ketimpangan antar provinsi dapat diminimalisir, terutama untuk provinsi-provinsi yang memiliki sumber daya yang lebih terbatas Yuvanda et al (2023). Di sisi lain, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 membawa pendekatan yang lebih komprehensif dan transparan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu karakteristik utamanya adalah peningkatan fleksibilitas penggunaan dana perimbangan dengan tetap menekankan transparansi, sehingga daerah memiliki ruang lebih luas dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dalam konteks ini, dana perimbangan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah, terutama di luar Jawa, dapat mengejar ketertinggalannya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar provinsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Namun, implementasi kebijakan ini tidak bisa terlepas dari tantangan-tantangan terkait efektivitas penggunaan dana perimbangan di setiap daerah (Andaresta & Riani, 2023).

Dana Alokasi Umum (DAU) mencerminkan karakteristik wilayah karena besarnya alokasi yang diterima oleh suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, yang menegaskan bahwa kriteria-kriteria tersebut menjadi dasar dalam distribusi DAU untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) berfungsi untuk mendanai kegiatan atau proyek spesifik yang menjadi prioritas nasional, namun memerlukan pengelolaan di tingkat daerah, seperti pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pembagian pendapatan dari sumber daya alam, pajak, atau pendapatan negara lainnya yang bersumber dari daerah. DBH bertujuan untuk mendorong daerah memaksimalkan potensi ekonominya guna meningkatkan pendapatan daerah (DJPk Kemenkeu).

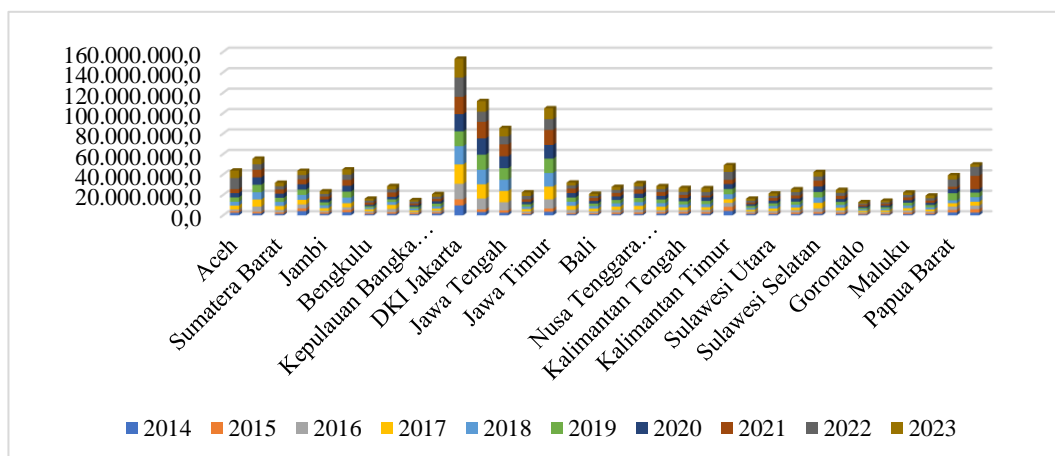
Dana Perimbangan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan sumber daya mereka sendiri. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas sering kali kesulitan dalam menyediakan layanan publik memadai yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Penelitian Mahi dan Hasan (2021) peningkatan alokasi Dana Perimbangan secara signifikan meningkatkan investasi di daerah-daerah tertinggal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiton (2019) Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal tersebut

sejalan dengan penelitian Sidik et al. (2020) yang menunjukkan Dana Perimbangan mengalami peningkatan, perkembangan tingkat ketimpangan daerah cenderung mengalami penurunan. Sedangkan Indeks Williamson menunjukkan DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan, dan DBH, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan.

Meskipun Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa, yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, masih menghadapi ketertinggalan dalam berbagai sektor pembangunan. Penelitian Purba dan Simandjorang (2024) menunjukkan bahwa alokasi Dana Perimbangan yang kurang proporsional sering kali memperburuk ketimpangan, terutama di daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang rendah.

Selain mengurangi ketimpangan, dana perimbangan bertujuan mendorong pemerataan pembangunan antar provinsi. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses terhadap sumber daya yang terbatas mendapatkan prioritas lebih dalam alokasi DAU dan DAK. Penelitian oleh Mumuka dan Elim (2014) menunjukkan bahwa meskipun dana perimbangan telah berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan di beberapa provinsi, terutama di luar Jawa, tantangan dalam hal pengelolaan dan implementasi anggaran masih menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan yang lebih optimal.



Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2014-2023

Gambar 1. 2 Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar 1.2 menggambarkan dana perimbangan provinsi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023, terlihat bahwa terdapat variasi signifikan dalam alokasi dana antar provinsi. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah menerima jumlah Dana Perimbangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi di luar Pulau Jawa seperti Maluku, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi yang relatif lebih kecil dan cenderung stabil sepanjang tahun.

Ada ketimpangan dalam alokasi Dana Perimbangan antara provinsi di Jawa dan luar Jawa, di mana provinsi di Jawa cenderung memperoleh alokasi yang lebih besar. Hal ini mencerminkan ketergantungan pemerintah pusat dalam membiayai provinsi-provinsi yang lebih padat penduduk dan pusat-pusat ekonomi utama. Beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku mengalami kenaikan yang relatif kecil, menunjukkan stagnasi dalam distribusi anggaran meskipun ada kebutuhan pembangunan di wilayah-wilayah ini. Selain itu, pada tahun 2023, terlihat adanya peningkatan signifikan di beberapa provinsi seperti Papua Barat, yang dapat mengindikasikan adanya kebijakan khusus atau program pembangunan yang ditargetkan. Dari analisis tersebut tergambar masalah bagaimana ketidakmerataan distribusi Dana Perimbangan berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan daerah adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Secara teoritis, peningkatan TPAK diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan yang merata melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat Sianturi et al. (2024). Namun, dalam praktiknya, kontribusi TPAK terhadap pengurangan ketimpangan pembangunan tidak selalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas tenaga kerja yang belum merata, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Akibatnya, meskipun partisipasi angkatan kerja meningkat, tidak semua individu dapat memperoleh pekerjaan yang layak atau berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah. Ashari dan Athoillah (2023). Daerah dengan TPAK yang tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih merata, sehingga ketimpangan

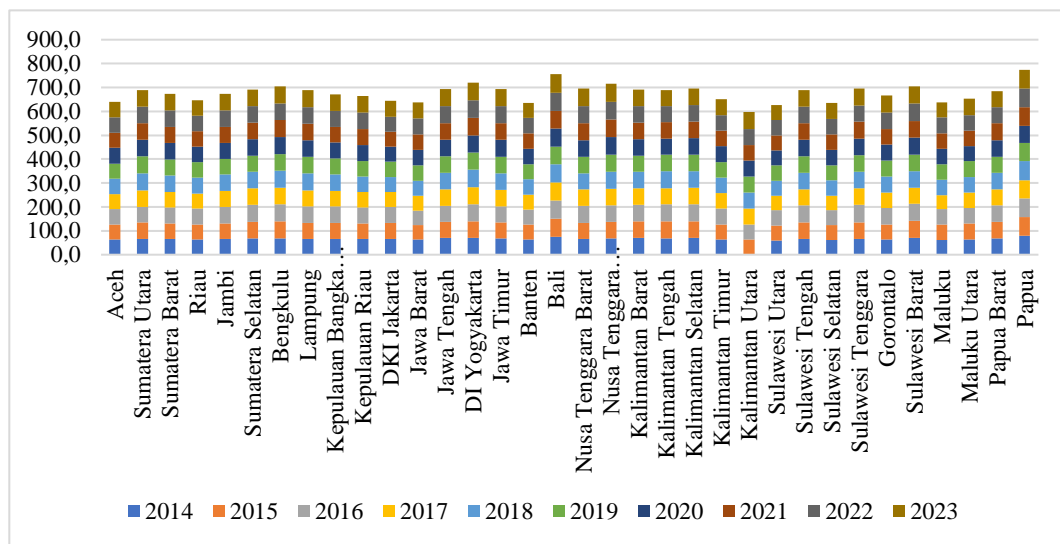
ekonomi di daerah tersebut lebih rendah. Menurutnya, peningkatan partisipasi angkatan kerja juga berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, yang didorong oleh pendidikan dan pelatihan yang lebih baik (Hierdawati, 2022).

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Daerah dengan tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi biasanya memiliki produktivitas ekonomi yang lebih baik, karena lebih banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berfungsi sebagai ukuran untuk menilai perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu negara atau wilayah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat (Putriana & Aji, 2022).

Peran TPAK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Provinsi dengan TPAK yang tinggi cenderung memiliki basis tenaga kerja yang lebih besar, yang berarti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga lebih besar. Peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat mempercepat proses industrialisasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas sektor-sektor ekonomi. Penelitian oleh Pamati dan Woyanti (2021) menunjukkan bahwa TPAK menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, di mana peningkatan TPAK cenderung mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan, hal ini terjadi karena partisipasi angkatan kerja meningkat tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas atau peningkatan keterampilan, maka dampak positif terhadap pemerataan pendapatan mungkin tidak tercapai.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi tidak selalu merata di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi dengan TPAK yang rendah, seperti di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, sering kali tertinggal dalam pembangunan dan pelayanan publik karena kurangnya tenaga kerja produktif yang terlibat dalam sektor ekonomi formal. Penelitian Matondang et al. (2024) menemukan bahwa daerah-daerah dengan TPAK rendah memiliki kesenjangan pembangunan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan TPAK tinggi, terutama terkait dengan tingkat pendapatan dan akses terhadap lapangan kerja yang layak.

Untuk mencapai pemerataan pembangunan, tingkat partisipasi angkatan kerja perlu ditingkatkan di seluruh provinsi Indonesia, terutama di wilayah yang masih tertinggal. Dengan memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, daerah-daerah yang memiliki TPAK rendah dapat lebih berdaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian oleh Syamsuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan TPAK di provinsi-provinsi yang tertinggal mampu memperkecil kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014-2023

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar 1.3 memperlihatkan beberapa pola menarik yang dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan peningkatan TPAK yang konsisten, menandakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat ketimpangan regional yang jelas, di mana provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Papua, Maluku Utara, dan Gorontalo, mencatat TPAK yang lebih rendah. Provinsi-provinsi seperti Maluku, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan stagnasi dalam TPAK, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau kebijakan yang kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Dari analisis tersebut tergambar masalah apakah peningkatan TPAK terjadi secara merata di seluruh provinsi atau justru

terkonsentrasi di wilayah tertentu, yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan daerah.

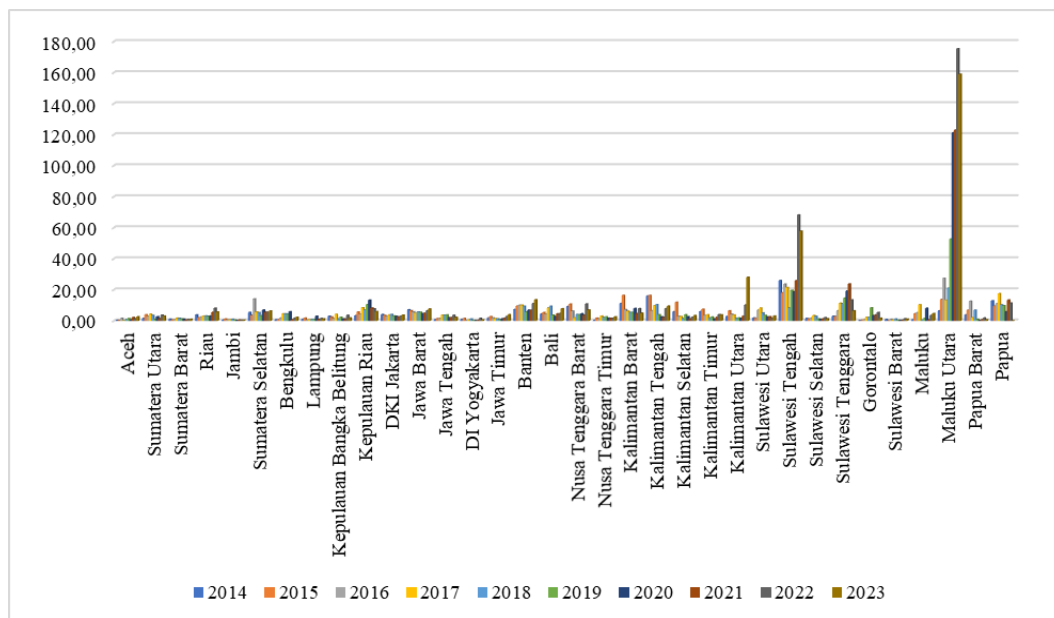
Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, *Foreign Direct Investment* (FDI) muncul sebagai salah satu instrumen yang dapat mempercepat proses tersebut. FDI dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia. FDI tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga memiliki dampak yang lebih besar di daerah-daerah yang kurang berkembang Mauliarumpaka & Zainuri (2023). Selain itu FDI dapat mempercepat diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya bergantung pada satu sektor tertentu, seperti pertanian atau perikanan. Dengan investasi asing yang masuk, daerah-daerah tersebut dapat mulai mengembangkan sektor-sektor baru, seperti manufaktur atau pariwisata, yang lebih menguntungkan dan stabil secara ekonomi (Hartono et al., 2024).

Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung merupakan salah satu sumber investasi penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. FDI berperan dalam mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Aryani et al. (2023), FDI memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yang menerima aliran investasi asing dalam jumlah besar, karena meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama.

Meskipun FDI memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi daerah, distribusinya yang tidak merata di berbagai provinsi dapat memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Provinsi yang memiliki sumber daya yang lebih baik, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, lebih banyak menarik FDI, sementara daerah-daerah di luar Pulau Jawa seringkali sulit bersaing dalam menarik investasi asing. Penelitian oleh Zohara (2021) menemukan bahwa ketimpangan dalam aliran FDI di Indonesia berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan antarprovinsi, karena daerah-daerah yang lebih tertinggal sulit menarik FDI akibat kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati (2019) menunjukkan bahwa *Foreign Direct*

Investment (FDI) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azim et al. (2022), yang juga menemukan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Untuk menciptakan pemerataan pembangunan, distribusi FDI perlu diperluas ke provinsi-provinsi yang tertinggal, terutama di luar Pulau Jawa. Dengan meningkatkan daya tarik investasi di wilayah tersebut, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah dapat menarik FDI yang lebih merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi Indonesia. Menurut penelitian oleh Nadzir dan Kenda (2023), FDI yang lebih merata di seluruh provinsi Indonesia berpotensi mempercepat proses pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014-2023

Gambar 1. 4 Foreign Direct Investment Indonesia Tahun 2014- 2023

Gambar 1.4 *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023 memperlihatkan perbedaan signifikan dalam aliran investasi asing di berbagai provinsi. Terlihat adanya fluktuasi kontribusi FDI di berbagai provinsi. Tren peningkatan signifikan tampak di Maluku Utara. FDI Maluku Utara tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan, dengan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Lokasi

strategis di kawasan Indonesia Timur juga mendukung ekspor hasil tambang. Sebaliknya, sebagian besar provinsi lain menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, sedangkan daerah-daerah lain, termasuk pusat-pusat ekonomi utama seperti Jawa dan Sumatra, menunjukkan pertumbuhan yang kurang signifikan.

Meskipun distribusi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia saat ini masih terpusat di wilayah tertentu seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, hal ini justru dapat memperkuat ketimpangan pembangunan antarwilayah karena manfaat ekonomi dari FDI hanya terakumulasi di wilayah tertentu Mahadiansar et al., (2021). Konsentrasi FDI di satu wilayah dapat menciptakan kesenjangan yang semakin dalam antara daerah maju dan tertinggal, terutama jika tidak disertai dengan pemerataan infrastruktur dan kebijakan penyeimbang. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sjafrizal (2008), yang menyatakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi pada wilayah tertentu dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah dengan konsentrasi ekonomi tinggi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih rendah.

Namun demikian, FDI tetap memiliki potensi besar dalam menurunkan ketimpangan jika diarahkan ke wilayah-wilayah yang tertinggal. FDI mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta mendorong alih teknologi dan peningkatan produktivitas di daerah penerima investasi Aryani et al., (2023). Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sering menyertai investasi asing juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, seperti pemberian insentif bagi investor di luar Pulau Jawa, FDI dapat diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi daerah dan memperkecil kesenjangan antar wilayah Nurwahyuni et al., (2023). Oleh karena itu, FDI bukan hanya berisiko meningkatkan ketimpangan, tetapi juga dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Penyebaran *Foreign Direct Investment* (FDI) secara merata sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Akses jalan yang baik tidak hanya menurunkan biaya logistik dan distribusi, tetapi juga

meningkatkan daya tarik daerah terhadap investor asing Ferdian dan Satrianto (2022). Infrastruktur jalan yang memadai memungkinkan konektivitas antardaerah, memperlancar arus barang, tenaga kerja, dan informasi, serta memperkuat integrasi ekonomi wilayah Lakshmanan (2011). Dalam konteks Indonesia, pembangunan jalan nasional dan jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah tertinggal diyakini mampu mendorong masuknya investasi asing ke luar Pulau Jawa Bappenas (2020). Dengan demikian, keberadaan infrastruktur jalan yang baik menjadi faktor kunci dalam mengarahkan FDI ke daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh investasi, sehingga dapat membantu menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Selain manfaat langsung, FDI juga memiliki efek penyebaran *spread effect* yang dapat menguntungkan wilayah sekitar daerah penerima investasi. Ketika FDI masuk ke suatu wilayah, dampaknya tidak hanya dirasakan di lokasi utama, tetapi juga menyebar ke daerah sekitarnya melalui peningkatan permintaan bahan baku, tenaga kerja, dan jasa pendukung (Richardson, 1976). Aktivitas ekonomi yang tumbuh di satu wilayah akibat FDI dapat menciptakan jaringan produksi dan distribusi yang mendorong pengembangan usaha lokal di kawasan lain Tiara dan Hendarto (2023). Dengan adanya efek penyebaran ini, FDI tidak hanya memperkuat ekonomi lokal secara parsial, tetapi juga dapat memicu pertumbuhan yang lebih luas di tingkat regional, sehingga berpotensi memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat diuraikan:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penulis berharap penelitian ini bisa memperkaya kajian akademik mengenai Analisis Ketimpangan Pembangunan daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi komprehensif kepada pemerintah mengenai analisis ketimpangan pembangunan dan memberikan gambaran terkait kebijakan apa yang perlu diperbaiki untuk mengurangi ketimpangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Regional

Pembangunan wilayah atau pembangunan regional merupakan konsep yang menekankan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, infrastruktur, transportasi, komunikasi, struktur industri, teknologi, perdagangan antar wilayah, serta aspek kelembagaan dalam suatu daerah. Semua faktor ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan wilayah secara komprehensif Ridwan (2016)

Dalam kajian pembangunan ekonomi wilayah, terdapat beberapa teori utama yang menjadi dasar pemikiran, antara lain pemikiran aliran Klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Smith menekankan pentingnya spesialisasi atau pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan investasi dan persediaan modal. Konsep ini sejalan dengan hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mengalami perlambatan akibat keterbatasan sumber daya. Selain itu, prinsip '*laissez-faire*' yang dianut oleh ekonomi Klasik menekankan minimnya campur tangan pemerintah dalam proses ekonomi, sehingga pasar bebas menjadi mekanisme utama dalam pembangunan ekonomi wilayah.

Pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar wilayah yang berbeda dalam suatu negara. (Myrdal et al., 1957) menyatakan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, wilayah yang lebih maju cenderung tumbuh lebih cepat

dibandingkan dengan wilayah yang tertinggal, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Oleh karena itu, strategi pembangunan regional sering kali menekankan perlunya distribusi yang lebih merata dari, investasi, dan akses terhadap peluang ekonomi agar semua daerah dapat berkembang secara bersama-sama dan adil.

Pembangunan regional adalah suatu proses peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di berbagai wilayah dengan memperhatikan perbedaan karakteristik tiap-tiap daerah. Pembangunan regional tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan pembangunan agar setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensinya Tarigan (2005). Tarigan menekankan bahwa pembangunan regional harus memperhatikan perbedaan sumber daya di setiap wilayah, seperti sumber daya alam, dan kondisi sosial-ekonomi. Pembangunan yang berbasis pada potensi lokal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah, sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah.

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan daerah mengacu pada perbedaan mencolok dalam tingkat pembangunan dan kesejahteraan antar wilayah. Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh distribusi sumber daya alam yang tidak merata, akses terbatas terhadap infrastruktur, serta disparitas dalam investasi dan kesempatan kerja. Menurut Sjafrizal (2008) ketimpangan ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah meliputi perbedaan potensi sumber daya alam, variasi kondisi demografis, serta keterbatasan dalam mobilitas barang dan jasa, serta alokasi dana pembangunan yang tidak merata.

Selain itu, perbedaan dalam kondisi demografis, seperti jumlah penduduk dan komposisi usia, juga berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan. Wilayah dengan jumlah penduduk produktif yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan

ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang didominasi oleh penduduk non-produktif. Kurangnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, antar daerah juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Menurut Yadiansyah (2007) mobilitas faktor produksi yang rendah menghambat penyebaran pertumbuhan ekonomi secara merata antar wilayah. Alokasi dana pembangunan yang tidak merata antar wilayah juga memperparah ketimpangan pembangunan. Wilayah yang mendapatkan porsi anggaran lebih besar cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang menerima anggaran lebih kecil.

Douglas C. North, dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, mengemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu fenomena yang lazim dijumpai dalam proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan hipotesis Neo-Klasik, pada fase awal pembangunan, kesenjangan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini berlanjut hingga ketimpangan mencapai titik puncaknya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan terus berlangsungnya pembangunan, ketimpangan tersebut akan berangsur-angsur menurun, menuju keseimbangan yang lebih merata antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Myrdal et al. (1957) mengemukakan teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi yang menyoroti ketimpangan regional dalam konteks pembangunan. Myrdal berpendapat bahwa proses pembangunan cenderung menghasilkan ketidakseimbangan antara wilayah maju dan terbelakang. Hal ini disebabkan oleh adanya efek balik (*backwash effect*) yang lebih dominan dibandingkan dengan efek penyebaran (*spread effect*). Efek balik mengacu pada aliran sumber daya, seperti modal dan tenaga kerja, dari wilayah kurang berkembang ke wilayah yang lebih maju, sehingga memperburuk ketimpangan antar daerah.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, salah satu alat yang digunakan adalah, Indeks Jaime Bonet.

Indeks Jaime Bonet merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan mempertimbangkan perbedaan pendapatan per kapita relatif. Indeks ini dikembangkan oleh Jaime Bonet untuk

mengidentifikasi disparitas ekonomi antar daerah dan memahami dinamika ketimpangan regional.

Pengertian dan Prinsip Dasar Indeks Jaime Bonet yang merupakan alat ukur ketimpangan pembangunan yang dikembangkan oleh ekonom Jaime Bonet. Indeks ini mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah berdasarkan berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan. Prinsip dasar dari indeks ini adalah untuk menangkap perbedaan distribusi sumber daya ekonomi antar daerah, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kesenjangan pembangunan. Indeks ini digunakan secara luas karena sifatnya yang menyeluruh dan kemampuannya dalam mengukur ketimpangan dengan mempertimbangkan berbagai variabel pembangunan.

Indeks Jaime Bonet dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah. Dibandingkan dengan alat ukur ketimpangan lainnya seperti Indeks Gini, Indeks Jaime Bonet tidak hanya mengukur distribusi pendapatan tetapi juga mencakup berbagai dimensi pembangunan. Indeks ini juga relevan dalam konteks Indonesia, mengingat tingginya disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Dengan menggunakan indeks tersebut dapat menggambarkan ketimpangan antar daerah dengan menggunakan rumus Bonet (2006) sebagai berikut :

$$I_{it} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan :

I_i = Ketimpangan pembangunan daerah
 t = Tahun
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB perkapita provinsi
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB perkapita nasional

Penelitian terdahulu yang menggunakan indeks jaime bonet untuk analisis ketimpangan beberapa studi telah menggunakan indeks jaime bonet untuk menganalisis ketimpangan pembangunan di berbagai negara. Sebagai contoh, (Bonet & Meisel, 2009) sendiri menggunakan indeks ini dalam penelitiannya di Amerika Latin untuk mengukur ketimpangan antar wilayah di Kolombia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, ketimpangan antar daerah tetap signifikan. Penelitian ini menunjukkan relevansi dan keunggulan indeks jaime bonet dalam memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai ketimpangan pembangunan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan antar daerah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor Ekonomi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki pembangunan yang lebih cepat dibandingkan daerah yang pertumbuhannya rendah.
- b. Ketersediaan Investasi, daerah yang menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing (*Foreign Direct Investment*) FDI, biasanya mengalami pembangunan lebih cepat.
- c. Pendapatan Per Kapita, ketimpangan pembangunan dapat dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan per kapita antar daerah. Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi memiliki akses lebih baik terhadap dan layanan publik.
- d. Diversifikasi Ekonomi, ketergantungan pada satu sektor ekonomi (misalnya pertanian) dapat membuat pembangunan daerah stagnan. Sebaliknya, diversifikasi sektor ekonomi (misalnya industri dan jasa) dapat mempercepat pembangunan.

2. Faktor Sosial:

- a. Pendidikan, Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pembangunan karena mengurangi produktivitas tenaga kerja.
- b. Kesehatan, Akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah dapat menunjukkan kurangnya kesempatan kerja dan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.

3. Faktor Geografis:

- a. Kondisi Geografis dan Alam, Daerah yang sulit dijangkau, terpencil, atau memiliki kondisi alam yang kurang mendukung (seperti daerah pegunungan atau kepulauan) seringkali tertinggal dalam pembangunan.
- b. Sumber Daya Alam, Ketersediaan sumber daya alam bisa menjadi keuntungan bagi pembangunan daerah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan ketimpangan dan konflik.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah:

- a. Dana Perimbangan dan Distribusi dana dari pemerintah pusat ke daerah (seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) yang tidak proporsional dapat memperburuk ketimpangan.
- b. Kebijakan Desentralisasi, Kebijakan desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan, sedangkan desentralisasi yang tidak terencana dapat memperburuk ketimpangan.
- c. Perencanaan dan Implementasi Kebijakan, Perencanaan pembangunan yang tidak merata dan kurangnya monitoring serta evaluasi dapat menyebabkan ketimpangan dalam hasil pembangunan.

Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketika sumber daya dan investasi hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, potensi dari daerah-daerah lain tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, di mana daerah yang tertinggal tidak dapat berkontribusi secara maksimal terhadap PDB nasional (Todaro & Smith, 2011).

Indonesia merupakan contoh nyata dari negara yang menghadapi ketimpangan pembangunan yang signifikan, terutama antara wilayah barat dan timur. Pulau Jawa, misalnya, menyumbang lebih dari 50% PDB nasional, sementara wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah. (Hill, 2014).

Ketimpangan pembangunan yang terus berlangsung ini menuntut adanya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang berfokus dana perimbangan yang lebih adil, merupakan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengurangi ketimpangan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diminimalisir, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata (Sistara et al., 2021).

2.1.3 Konsep Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam suatu wilayah administratif tertentu. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota memiliki peran dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah merupakan entitas yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lokal, serta sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. Definisi ini menekankan pentingnya koordinasi antara tingkat pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan meliputi berbagai aspek yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah daerah:

- a. Penggerak pembangunan ekonomi, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi mencakup penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan usaha, dan fasilitasi investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
- b. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan

- pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
- c. Pelayanan publik, pemerintah daerah berperan dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efektivitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan anggaran daerah yang transparan serta akuntabel.
 - d. Tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan proses pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan regulasi untuk mengatur tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang- undang ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, dan akuntabel.

Undang- undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pemberian sumber penerimaan daerah, yang mengatur mengenai pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
2. Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang mengatur mengenai pengelolaan transfer ke daerah
3. Pengelolaan belanja daerah, yang mengatur mengenai pengelolaan belanja daerah.

4. Pemberian Kewenangan Pembiayaan Daerah, yang mengatur mengenai pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah.
5. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, yang mengatur mengenai pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Desentralisasi fiskal mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Desentralisasi pendapatan, yang memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan sendiri.
2. Desentralisasi belanja, yang memungkinkan pemerintah daerah menentukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah, dan
3. Sistem transfer keuangan dari pusat ke daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan mekanisme perimbangan keuangan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- a. Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.
- c. Dana Insentif dan Dana Otonomi Khusus, yang diberikan kepada daerah dengan kinerja keuangan yang baik atau memiliki status khusus dalam kerangka otonomi daerah.

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dan perkembangan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola anggaran secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan dan regulasi pemerintah pusat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal antara lain:

- a. Kapasitas fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri.
- b. Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
- c. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi fiskal berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme desentralisasi fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan peran pemerintah daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, guna mencapai pembangunan yang lebih merata. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sumber dana berasal dari pendapatan APBN. Besar kecilnya DAU ditentukan oleh formula yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal meliputi biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik, yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator pembangunan lainnya. Sementara itu, kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dari sumber lokal seperti pajak dan retribusi. Tujuannya adalah untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah, dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, sehingga semua daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan publik yang optimal. DAU dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah, sehingga daerah dengan kapasitas fiskal lebih rendah mendapatkan alokasi yang lebih besar.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK), besar kecilnya ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Besaran DAK tergantung pada beberapa faktor, seperti kebutuhan pendanaan daerah untuk sektor tertentu, kapasitas fiskal daerah, serta program-program strategis yang sedang dijalankan. Sumber DAK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan untuk membantu daerah membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari anggaran daerah sendiri. Besaran DAK ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan peningkatan layanan dasar atau percepatan pembangunan di sektor tertentu. Dana Alokasi Khusus terdiri dari tiga jenis utama:
 - 1) DAK fisik, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik di daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan irigasi.
 - 2) DAK non-fisik, digunakan untuk mendukung kebijakan nasional dalam bentuk bantuan operasional atau program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
 - 3) DAK afirmasi, dialokasikan khusus untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.
- c. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan proporsi tertentu. DBH bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah serta memberikan insentif bagi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan negara. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam (SDA) dan pajak pusat, seperti:
 - 1) DBH Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 2) DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang berasal dari sektor minyak bumi, gas alam, kehutanan, perikanan, pertambangan umum, dan panas bumi.

Mekanisme penyaluran dana perimbangan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, dengan alokasi yang dihitung berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan potensi fiskal daerah. Tujuan utama dari penyaluran dana perimbangan adalah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memadai, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal. Peran utama dana perimbangan dalam pembangunan daerah meliputi:

- a. Memperbaiki kemampuan fiskal daerah: DAU memungkinkan daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- b. Mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik: DAK difokuskan pada pendanaan program-program yang bersifat prioritas nasional, terutama infrastruktur fisik dan layanan publik, yang menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.
- c. Memberikan insentif bagi daerah penghasil sumber daya alam: DBH memungkinkan daerah yang menghasilkan sumber daya alam, seperti minyak, gas, atau hasil tambang lainnya, untuk memperoleh bagian dari pendapatan negara, sehingga mereka mendapatkan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya tersebut.

John Maynard Keynes 1936, dalam teorinya tentang ekonomi makro, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dalam pandangan Keynes, pemerintah memiliki peran krusial dalam mengelola perekonomian, terutama melalui intervensi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi permintaan agregat. Implementasi Dana Perimbangan mencerminkan peran aktif pemerintah dalam distribusi sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk stimulus fiskal dapat

mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ristabet, 2018).

2.1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Definisi dan Konsep TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Hierdawati (2022) TPAK mencerminkan kapasitas suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan kebijakan pasar tenaga kerja.

Pengaruh TPAK terhadap Produktivitas Ekonomi dan Pembangunan Daerah TPAK berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Daerah dengan TPAK tinggi biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011), peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama dari kelompok muda dan perempuan, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dengan memperluas basis tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini penting untuk memahami seberapa besar kontribusi penduduk dalam aktivitas ekonomi dan seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa. Menurut BPS (2021), TPAK dihitung sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja.

2.1.7 Foreign Direct Investment (FDI)

Pengertian dan Peran FDI dalam Pembangunan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain, biasanya dalam bentuk pendirian perusahaan baru atau akuisisi aset. FDI memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan modal, teknologi, dan keterampilan manajerial. Menurut (Dunning, 1993), FDI

menjadi instrumen penting dalam globalisasi ekonomi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas produksi.

Dampak FDI terhadap Transfer Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Daerah
Salah satu dampak positif FDI adalah transfer teknologi. Ketika perusahaan asing berinvestasi di suatu daerah, mereka membawa teknologi, pengetahuan, dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing lokal. FDI juga meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan standar kualitas produk, dan memperluas akses ke pasar internasional (Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, 1998).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, FDI diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan Penanaman Modal Asing sebagai "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri." Dengan demikian, FDI di Indonesia tidak hanya berperan dalam peningkatan investasi, tetapi juga dalam mendukung pembangunan daerah melalui distribusi modal dan inovasi teknologi yang lebih merata.

Dalam konteks teori ekonomi regional, *spread effect* atau efek penyebaran menjelaskan bagaimana FDI dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dengan menyebarkan manfaat ekonomi dari wilayah yang lebih maju ke daerah tertinggal. Efek ini terjadi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di wilayah penerima investasi. menyoroti bagaimana FDI dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui efek penyebaran ini, meskipun dalam beberapa kasus, ketimpangan tetap terjadi jika investasi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu tanpa adanya kebijakan pemerataan yang efektif (Syamsir & Rahman, 2018).

Distribusi FDI di Indonesia menunjukkan bahwa investor cenderung menanamkan modal di wilayah yang memiliki faktor produksi lebih optimal, seperti tenaga kerja terampil, aksesibilitas pasar, dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, daerah yang telah lebih berkembang cenderung menerima investasi dalam jumlah yang

lebih besar, sementara daerah yang masih tertinggal menghadapi kesulitan dalam menarik investasi asing. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah seperti Maluku Utara mulai menunjukkan peningkatan dalam penerimaan FDI dibandingkan dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia, seperti Papua. Pada tahun 2023, Maluku Utara bahkan tercatat sebagai salah satu penerima investasi asing tertinggi di kawasan tersebut, meskipun proporsinya masih tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 0,07 persen dari total investasi nasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran investasi yang perlahan mulai mengarah ke wilayah di luar pusat pertumbuhan utama, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mendorong pemerataan investasi di seluruh Indonesia.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Gita dan Hendarito (2023)	Bebas: PMA, PMDN, Dana Perimbangan, dan Aglomerasi Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Regresi Data Panel dengan model REM	Berdasarkan hasil penelitian, PMA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, PMDN juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sementara DP memiliki pengaruh yang signifikan, dan variabel Aglomerasi tidak berpengaruh secara signifikan.
2	Sri Hartati, (2019)	Bebas: IPM, Infarstruktur Jalan, FDI Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Regresi Data Panel dengan FEM	IPM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan infrastruktur jalan dan FDI berpengaruh positif signifikan. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh signifikan.
3	Damara et al. (2024)	Bebas: Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Jumlah Penduduk Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Regresi Data Panel	Dalam uji F pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil uji t, pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan. Investasi tidak berdampak signifikan, dan variabel populasi berdampak signifikan, hanya

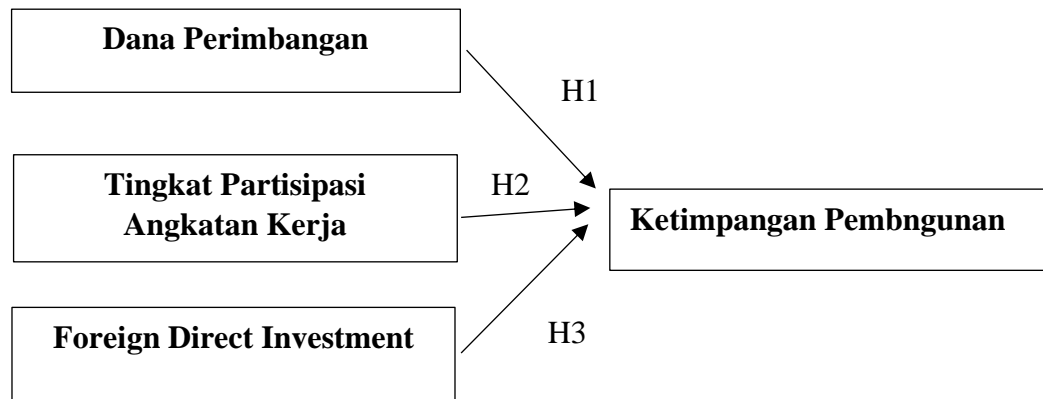
No	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
				variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan
4	Kiton (2019)	Bebas: Investasi, Angkatan Kerja, Dana Perimbangan, dan Aglomerasi Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Regresi Linier Berganda Fixed Effect Model	Hasil penelitian menunjukkan Investasi berpengaruh negatif dan signifikan, angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan. Dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi berpengaruh terhadap ketimpanga
5	Pamiati dan Woyanti (2021)	Bebas: Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan Popoulasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan
6	Kurniati Mansyur et al. (2021)	Bebas: Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, Investasi

No	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		Terikat: Ketimpangan Pembangunan		berpengaruh negatif dan signifikan, Pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.
7	Azim et al. (2022)	Bebas: IPM, Infrastruktur Jalan, dan FDI Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Indeks Williamson, dan Regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan IPM berpengaruh negatif signifikan, Infrastruktur jalan dan investasi asing berpengaruh positif signifikan. Indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan, dan investasi asing secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.
8	Almuazam dan Sirait (2020)	Bebas: Aglomerasi Produksi, IPM, Derajat Kemandirian Fiskal, Dana Perimbangan, Panjang Jalan Terikat: Ketimpangan Pendapatan	Regresi Spasial SEM-RE, Jaime sebagai ketipangan pembangunan daerah	Panel dengan Indeks Bonet proksi Hasil penelitian menunjukkan Aglomerasi produksi serta (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, derajat kemandirian fiskal, dana perimbangan, dan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan, sementara ketimpangan pendapatan

No	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
				dipengaruhi oleh faktor lain dari wilayah-wilayah tetangga yang tidak termasuk dalam model.
9	Cahyani dan Mulyo (2022)	Bebas: Transformasi Struktural, Jumlah Penduduk, TPAK, dan IPM Terikat: Ketimpangan Wilayah	Regresi Data Panel dengan model FEM	Hasil penelitian menunjukkan, Transformasi Struktural berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, TPAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, dan IPM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
10	Aurelia Andaresta dan Riani (2023)	Bebas: PAD, FDI, dan Pengangguran Terikat: Ketimpangan Pembangunan	Indeks Williamson Data Panel REM	Hasil penelitian menunjukkan PAD, dan Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan. FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketipangan pembangunan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, berdasarkan teori yang ada. Fungsi utamanya adalah untuk merumuskan hipotesis dan mengarahkan analisis, serta menjadi dasar dalam menggali dan menganalisis data yang relevan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka dapat ditentukan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian, yaitu:

1. Diduga Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.
2. Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.
3. Diduga *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel ketimpangan pembangunan daerah sebagai variabel terikat (Y) dan dana perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai variabel bebas (X). Fokus penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan daerah 34 provinsi di Indonesia, sebagaimana yang diakui dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup periode waktu tertentu. Data panel ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan dan dampak dari variabel-variabel independen terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa angka dan dianalisis menggunakan metode kuantitatif, serta ditambah dengan pendekatan kualitatif dalam model yang terstruktur (Unaradjan, 2019). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal untuk menganalisis ketimpangan pembangunan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKE), serta didukung oleh referensi dari jurnal dan buku-buku yang relevan. Data sekunder tersebut diolah dalam bentuk data panel, yang mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* mencakup periode tahun 2014 hingga 2023, sementara data *cross section* terdiri dari variabel-

variabel seperti Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan *Foreign Direct Investment* sebagai variabel independen, dengan ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia sebagai variabel dependen.

Tabel 3. 1 Sumber dan Data Penelitian

Nama Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Indeks Jaime Bonet	IJB	Indeks	BPS (data diolah)
Dana Perimbangan	DP	Persen	DJPK
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	Persen	BPS
<i>Foreign Direct Investment</i>	FDI	Persen	BPS

3.3 Definisi Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel yaitu:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang diukur atau diamati untuk menilai efek dari perubahan pada variabel independen. Ini juga dikenal sebagai variabel terikat. Variabel dependen adalah hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Definisi variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan daerah.

Penelitian ini menggunakan Indeks Jaime Bonet dengan pendekatan PDRB per kapita relatif karena tidak memerlukan data pada wilayah yang lebih kecil, dapat mengukur ketimpangan antar provinsi hingga tingkat nasional, serta merepresentasikan kontribusi PDRB per kapita provinsi terhadap PDRB per kapita nasional. Indeks ini bernilai antara 0 hingga tak terhingga dan mencerminkan tingkat ketimpangan suatu wilayah. Nilai indeks di atas satu menunjukkan tingginya ketimpangan pembangunan atau distribusi pendapatan, yang mencerminkan ketidakseimbangan sosial ekonomi antar wilayah. Pengukuran ketimpangan menggunakan rumus dari Bonet (2006) yang juga digunakan dalam studi (Azizah dan Suhartini 2021), sebagai pendekatan yang relevan dalam menganalisis ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

Dengan menggunakan indeks tersebut dapat menggambarkan ketimpangan antar daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{it} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan :

I_i = Ketimpangan pembangunan daerah
 t = Tahun
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB perkapita provinsi
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB perkapita nasional

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dikendalikan atau diubah oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Ini juga dikenal sebagai variabel prediktor atau eksplanatori. Variabel independen biasanya dianggap sebagai penyebab atau faktor yang memengaruhi hasil.

Definisi variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

Besar kecilnya Dana Perimbangan dapat menggambarkan karakteristik wilayah, karna Dana Perimbangan adalah instrumen yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wilayah dengan perekonomian lebih lemah atau tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah cenderung menerima dana perimbangan yang lebih besar sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel ini diukur dalam satuan rupiah yang dialokasikan kepada setiap daerah dalam kurun waktu sepuluh tahun, data diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Dana perimbangan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan daerah.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga diukur dalam persentase yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, di suatu provinsi. Semakin tinggi TPAK, semakin besar partisipasi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.

3. *Foreign Direct Investment* (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI), diukur dalam persentase, mencerminkan besarnya investasi asing yang masuk ke suatu provinsi dan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik dan ekonometri *Eviews* 12 dan *Microsoft Excel* 2019 sebagai alat olah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan gabungan dari kedua jenis data yaitu *cross section* dan *time series*. Adapun manfaat menggunakan data panel diantaranya:

1. Melacak dan menganalisis data dari individu (misalnya, provinsi) yang sama selama beberapa periode waktu.
2. Melihat bagaimana variabel berubah dari waktu ke waktu, bukan hanya snapshot pada satu waktu.
3. Data panel menyediakan lebih banyak informasi dibandingkan data *cross-section* (data dari satu titik waktu) atau data *time-series* (data dari satu individu selama waktu).
4. Dapat memisahkan efek yang berkaitan dengan waktu (misalnya, efek dari resesi ekonomi) dan efek yang berkaitan dengan individu (misalnya, karakteristik spesifik provinsi) dari model.
5. Data panel mengurangi potensi bias yang mungkin timbul dari menggunakan data *cross section* saja, seperti bias yang disebabkan oleh variabel yang tidak terukur.
6. Dapat menerapkan teknik analisis yang lebih kompleks seperti model efek tetap dan efek acak.

Ada tiga cara utama untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu melalui *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Metode ini merupakan jenis analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen.

3.5 Metode Estimasi

Penelitian menggunakan metode estimasi dengan persamaan regresi data panel untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan *Foreign Direct Investment*), sedangkan variabel terikat yaitu Ketimpangan Pembangunan Daerah dengan menggunakan Indeks Jaime Bonet :

$$Y_{lit} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Selanjutnya fungsi tersebut dispesifikasikan ke dalam model sebagai berikut :

$$IJB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 FDI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

IJB	= Ketimpangan Pembangunan Daerah
DP	= Dana Perimbangan
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
FDI	= <i>Foreign Direct Investment</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien regresi variabel independen
ε	= Error term
i	= Provinsi
t	= Tahun

3.6 Prosedur Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif melibatkan penggunaan data untuk menyajikan atau menggambarkan informasi yang diperoleh tanpa melakukan generalisasi atau membuat asumsi. Analisis ini hanya mencakup pengumpulan data dasar yang bersifat informatif. Dengan kata lain, analisis ini tidak mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antar variabel, tidak menguji hipotesis, membuat prediksi, ataupun menarik kesimpulan (Ramadhan, 2021).

b. Regresi Data Panel

Peneliti menggunakan 34 provinsi, dan menggunakan data rentang waktu 10 tahun, maka model data panel yang digunakan bantuan program *Eviews 10*. Menurut Widarjono (2018), dalam pendekatannya model data panel terdiri dari model CEM, FEM, dan REM.

1. *Common Effect Model (CEM)*

CEM dikenal sebagai *Pooled Least Square (PLS)*, adalah pendekatan paling sederhana dalam analisis regresi data panel. Model ini menggabungkan data cross-section dan time-series tanpa mempertimbangkan perbedaan individu atau waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data adalah homogen. Estimasi parameter dalam CEM dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Kriteria utama penggunaan CEM adalah asumsi bahwa intersep dan koefisien slope bersifat konstan untuk semua individu dan periode waktu. Artinya, model ini tidak memperhitungkan adanya heterogenitas antar individu atau perubahan sepanjang waktu. CEM cocok digunakan ketika data yang dianalisis memiliki karakteristik serupa antar individu dan stabil sepanjang waktu (Gujarati & Porter, 2013).

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model adalah metode dalam analisis regresi data panel yang mengasumsikan bahwa setiap individu atau entitas memiliki intersep yang berbeda, namun dengan koefisien slope yang tetap sama antar individu dan waktu. Pendekatan ini menggunakan variabel dummy yang dikenal sebagai model efek tetap (*fixed effect model*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, yang juga disebut sebagai *Covariance Model*. Dalam metode ini, estimasi dapat dilakukan tanpa menggunakan bobot (*no weight*) melalui LSDV atau dengan menerapkan pembobotan (*cross-section weight*) menggunakan *Generalized Least Squares (GLS)*. Pembobotan diterapkan untuk mengurangi tingkat heterogenitas serta memastikan distribusi data lebih normal antar unit *cross-section* (Prastiwi dan Handayani (2021), Model ini cocok digunakan untuk menganalisis perubahan dalam setiap variabel, sehingga memberikan interpretasi data yang lebih fleksibel dan dinamis.

3. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model adalah salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu atau entitas ditangkap oleh efek acak (*random effects*) dalam model. REM menganggap bahwa variabel gangguan (*error term*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, serta memiliki distribusi normal dengan mean nol dan varians konstan. Estimasi parameter dalam REM dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Square*

(GLS), yang mempertimbangkan struktur varians-kovarians dari error term untuk menghasilkan estimasi yang efisien. REM lebih efisien dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* (FEM) karena mampu mengurangi penggunaan derajat kebebasan, terutama ketika jumlah individu atau entitas dalam sampel besar.

c. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

1) Uji Chow (Fixed Effect vs Common Effect)

Uji Chow digunakan untuk membandingkan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang lebih sesuai adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Model CEM lebih baik (tidak ada efek tetap)

H_a : Model FEM lebih baik (ada efek tetap)

2) Uji Hausman (*Fixed Effect vs Random Effect*)

Uji Hausman merupakan teknik yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis regresi data panel. Uji ini membandingkan efisiensi kedua model berdasarkan perbedaan estimasi parameter. Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan karena dianggap tidak ada korelasi antara efek individu dengan variabel independen.
2. Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai karena menunjukkan adanya korelasi antara efek individu dengan variabel independen.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM) lebih baik (tidak ada korelasi antara error individual dan variabel independen)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik (ada korelasi antara error individual dan variabel independen)

3) Uji Lagrange Multiplier (LM) (*Random Effect vs Common Effect*)

Uji Lagrange Multiplier adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM) dalam regresi data panel. Uji ini dikembangkan oleh Breusch Pagan dan bertujuan untuk menguji keberadaan efek individu dalam model.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai karena tidak terdapat efek individu yang signifikan dalam model.
2. Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan karena menunjukkan adanya efek individu yang signifikan dalam model.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : CEM lebih baik (tidak ada perbedaan antar individu)

H_a : REM lebih baik (ada perbedaan antar individu)

d. Individual Effect

Dalam analisis regresi data panel, pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan heterogenitas antarunit cross-section yang tidak dapat diamati secara langsung. Salah satu komponen penting dalam FEM adalah efek individual (*individual effect*), yang merepresentasikan karakteristik spesifik dari masing-masing unit cross-section yang bersifat tetap selama periode pengamatan. Menurut Widarjono (2013), efek individual dapat dihitung menggunakan rumus:

$$C_i = C + \beta$$

Di mana:

C_i = Individual Effect

C = konstanta

β = Koefisien dari masing-masing unit cross-section.

d. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi-asumsi yang penting agar hasil estimasi dapat dianggap valid dan reliabel.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Uji normalitas penting karena asumsi ini menjadi dasar dalam pengujian hipotesis dan validitas dari uji t dan uji F. Untuk melakukan uji normalitas, digunakan *J-B test* Uji *Jarque-Bera*, yang menguji kesimetrisan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari distribusi residual. *J-B test* memiliki kriteria hipotesis dalam pengujiannya:

H_0 : Jarque Bera stat > 5% residual terdistribusi secara normal

H_a : Jarque Bera stat < 5% residual terdistribusi secara tidak normal

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan tidak adanya hubungan linier yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan hasil uji signifikansi yang menyesatkan. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dilakukan dengan melihat nilai korelasi. Jika nilai korelasi < 0,85 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dan jika nilai korelasi > 0,85 maka sebaran data tersebut terjangkit masalah multikolinearitas.

H_0 : Jika nilai korelasi < 0,85 maka H_0 diterima

H_a : Jika nilai korelasi > 0,85 maka H_0 ditolak

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dapat digunakan beberapa metode, seperti Uji Breusch- Pagan

Hipotesisnya adalah:

H_0 = Model terbebas dari heteroskedastisitas

H_a = Model terdapat masalah heteroskedastisitas

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Terima H_0 ketika X^2 hitung $< X^2$ tabel, maka model tidak terdapat heteroskedastisitas
- b) Tolak H_0 ketika X^2 hitung $> X^2$ tabel, maka model terdapat masalah heteroskedastisitas

e. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau asumsi tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel, yang dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan statistik yang ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi.

1) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dalam model regresi linier. Uji t bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah bahwa koefisien regresi suatu variabel independen sama dengan nol (tidak ada pengaruh). Jika H_0 diterima, artinya variabel tersebut tidak signifikan secara statistik dalam model. Sebaliknya, jika H_0 ditolak, variabel tersebut signifikan (Gujarati & Porter, 2012).

Melalui Uji t, nilai t hitung harus dibandingkan dengan nilai t tabel. Nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel distribusi t dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = $n - k$. Oleh karena itu, hipotesis dalam pengujian ini ditentukan sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

$H_0: \beta_1 = 0$ Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

$H_1: \beta_1 < 0$ Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

b) Hipotesis 2

$H_0: \beta_2 = 0$ TPAK tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

$H_1: \beta_2 < 0$ TPAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

c) Hipotesis 3

$H_0: \beta_3 = 0$ FDI tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

$H_1: \beta_3 < 0$ FDI berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia.

2) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang diajukan sesuai dengan data yang digunakan atau tidak. Uji F membantu menentukan apakah koefisien variabel independen secara kolektif berbeda dari nol. Jika hasil uji menunjukkan bahwa koefisien-koefisien tersebut tidak signifikan secara bersama-sama, maka model regresi tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan prediktif yang baik. Maka dalam pengujian ini dilakukan hipotesis berupa :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ menjelaskan bahwa variabel Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, *Foreign Direct Investment* tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah.

H_a : Salah satu dari $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ menjelaskan bahwa salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah.

3) Koefisien determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang digunakan dalam analisis regresi untuk menjelaskan seberapa baik variabel independen dalam model menjelaskan variasi dari variabel dependen. R^2 memberikan informasi mengenai proporsi total variabilitas dalam variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Nilai R^2 selalu berada antara 0 dan 1.

$R^2 = 0$ berarti variabel independen sama sekali tidak menjelaskan variasi variabel dependen.

$R^2 = 1$ berarti variabel independen sepenuhnya menjelaskan variasi variabel dependen.

Dengan kata lain, semakin mendekati nilai R^2 ke 1, semakin baik model regresi tersebut menjelaskan variabilitas variabel dependen, dan semakin mendekati 0, semakin buruk kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme alokasi dana perimbangan berkontribusi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Artinya, semakin optimal distribusi dana perimbangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah, semakin kecil tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah. Dana perimbangan berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan setiap daerah, khususnya yang memiliki keterbatasan sumber daya, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, alokasi dana perimbangan yang efektif menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan serta memperkecil kesenjangan antar wilayah.
2. Hasil penelitian menunjukan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah, meskipun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Mekanismenya, peningkatan partisipasi angkatan kerja diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah, sehingga ketimpangan pembangunan dapat ditekan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan TPAK tidak serta-merta diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang adil di seluruh daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti kualitas tenaga kerja, struktur sektor ekonomi, dan akses terhadap lapangan kerja juga berperan penting,

sehingga TPAK sendiri belum cukup kuat untuk secara signifikan mempengaruhi penurunan ketimpangan pembangunan antar daerah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Mekanismenya, masuknya FDI ke dalam suatu wilayah berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan adanya investasi asing, daerah mampu mempercepat pertumbuhan ekonominya, yang pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Efek ini tercermin dari signifikansi hubungan negatif FDI terhadap ketimpangan, dimana semakin tinggi tingkat FDI yang diterima suatu daerah, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi. Temuan ini menegaskan pentingnya mendorong iklim investasi yang sehat dan merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan pada periode sepuluh tahun terakhir menunjukkan hasil negatif terhadap ketimpangan pembangunan daerah, disarankan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan Dana Perimbangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi Dana Perimbangan diarahkan untuk program-program pembangunan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan antar wilayah, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sektor ekonomi lokal, dan pemerataan layanan publik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana tersebut guna mengidentifikasi hambatan serta memperbaiki strategi alokasi agar Dana Perimbangan benar-benar mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus diperkuat agar akuntabilitas penggunaan Dana Perimbangan dapat terjaga, sehingga tujuan pemerataan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada periode sepuluh tahun terakhir menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan penelitian, disarankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait di bidang ketenagakerjaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan program pelatihan berbasis keterampilan, pendidikan, serta fasilitasi akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih luas. Meskipun pengaruh TPAK terhadap ketimpangan pembangunan daerah tidak signifikan, peningkatan partisipasi angkatan kerja yang berkualitas tetap penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Pemerintah daerah juga perlu merancang kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar seluruh kelompok usia produktif dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan secara lebih efektif.

3. *Foreign Direct Investment* temuan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan menunjukkan bahwa investasi asing dapat berperan dalam mengurangi disparitas wilayah. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait di bidang investasi untuk terus memperkuat upaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Langkah ini meliputi penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberian insentif yang menarik bagi investor asing. Mengingat FDI terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah, peningkatan realisasi investasi asing secara merata ke berbagai provinsi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih setara dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424–429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Almuazam, R. G., & Sirait, T. (2020). *Pemodelan Regresi Panel Spasial Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten / kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2020 (Spatial Panel Regression Modelling on The Effect of Fiscal Decentralization Policy on Income*. 2020(November), 741–750.
- Andaresta, R. A., & Riani, W. (2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2012-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1), 264–277. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.7159>
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Aryani, Z. N., Ahmad, A. A., & Gunawan, D. S. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan, Aglomerasi, PAD dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Pada Kabupaten/Kota di Yogyakarta Tahun 2011-2022. *Lingkar Ekonomika*, 2(2), 1–7.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Azizah, R. N., & Suhartini, A. M. (2021). *Pengaruh Sektor Industri , Sektor Pertanian , Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Jawa Barat Tahun 2015-2019*. 2019, 743–752.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>

- Bonet, J., & Meisel, A. (2009). Regional economic disparities in Colombia. *Investigaciones Regionales*, 14, 61–80.
- Booth, A. (1998). The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: a history of missed opportunities. In *Choice Reviews Online* (Vol. 36, Issue 01). <https://doi.org/10.5860/choice.36-0439>
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115-135. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth?. *Journal of international Economics*, 45(1), 115-135.
- BPS. (2021). *Survei angkatan kerja nasional 2021* (D. S. K. dan Ketenagakerjaan (ed.); Vol. 1). Badan Pusat Statistik.
- Cahyani, N., & Mulyo, H. R. (2022). *Pengaruh Transformasi Struktural, Jumlah Penduduk, TPAK dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah di Kawasan Kedungsepur Tahun 2010-2019*. 11(2), 126–133.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3942>
- Damara, R. D., Intan, U. I. N. R., Lampung, B., Jalan, A., Kolonel, L., Endro, H. J., Sukarame, K., & Bandar, K. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Tahun Periode 2019-2023) tantangan yang perlu diatasi . Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspe*. 4(3).
- Dawud, J. (2004). Inkonsistensi Penerapan Model Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Ilmu Pengembangan Dan Praktek Administrasi*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v1i3.340>
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Deveopment Anaysis Journal*, 5(1), 101–108. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- DJPK Kemenkeu. (n.d.-a). *Dana Perimbangan*. DJPK Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>
- DJPK Kemenkeu. (n.d.-b). *Pemanfaatan Dana Otsus*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-pemanfaatan-dana-otsus&utm>
- Dunning, J. H. (1993). International Direct Investment Patterns. *The Global Race for Foreign Direct Investment*, 107–132. https://doi.org/10.1007/978-3-642-78309-8_5
- Ferdian, F., & Satrianto, A. (2022). Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 73–95.
- Gita, G., & Hendarto, M. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman

- Modal Dalam Negeri, Dana Perimbangan, Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 12(2), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.37984>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat, 1. (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In N. Fax & A. E. Hilbert (Eds.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed.). Douglas Rainer.
- Habibi, M. (2024). Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 59–63. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1412>
- Hartono, P. G., Firman, A., & Endra, I. M. (2024). *The Influence of Gross Regional Domestic Product Per Capita and Foreign Direct Investment on Income Inequality: An Empirical Study of 34 Provinces in Indonesia*. 8(2). <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i2.23256>
- Hierdawati, T. (2022). Pengaruh TPAK, Kesehatan dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 958–966.
- Hill, H. (2008). Globalization, inequality, and local-level dynamics: Indonesia and the Philippines. *Asian Economic Policy Review*, 3(1), 42–61. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2008.00087.x>
- Hill, H. (2014). *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia* - Google Books. ISEAS. <https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=2qhXBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA45&dq=village+law+2014+indonesia&ots=FMFeD2As0s&sig=Y7KbHBnPi7hthMP2xIwOw5fBL0#v=onepage&q=village+law+2014+indonesia&f=false>
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019*, 603–612.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. In *National Mid-Term Development Plan 2020-2024* (p. 313). <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>
- Kiton, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
- Kurniati Mansyur, Nursini, & Hamrullah. (2021). *Development Policy and Management Review (DPMR) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan. 1(2), Unhas-scholer.*

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>

- Lakshmanan, T. R. (2011). The broader economic consequences of transport infrastructure investments. *Journal of Transport Geography*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.01.001>
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>
- Mahi, & Hasan. (2021). Pengaruh Perbaikan Intergritas Terhadap Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 57–68.
- Matondang, K. A., Nasution, N. F., Hasibuan, Z. H., Siagian, A. P., Ekonomi, I., Medan, U. N., Medan, K., & Utara, P. S. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 460–468.
- Mauliarumpaka, K., & Zainuri, Z. (2023). The Influence of Foreign Investment and Domestic Investment on Inequality in Economic Development between Regions in Java Island in 2012-2021. *Proceeding International Conference on Economics, Business and Information Technology (Icebit)*, 4(12), 162–168. <https://doi.org/10.31967/prmandala.v4i0.744>
- Mumuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 646–655.
- Myrdal, G., Duckworth, G., & Londres, C. (1957). “*economic theory and under-developed regions.*” 115–116.
- Nadzir, M., & Kenda, A. S. (2023). *Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri : Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 14(1), 317–328.
- Nurwahyuni, S., Alwasi, M. R. Y., Komaludin, A., Jumri, J., & Faturrohman, I. R. (2023). Pengaruh Investasi Asing Langsung, Upah Kerja, dan Literasi Tenaga Kerja terhadap Industri Manufaktur di Indonesia. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 25–30. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v4i1.7047>
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). 218-429-1-Pb. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(1), 18–28.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 17 (2005).
- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). ... Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of ...*, 10, 135–147. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/39681%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/download/39681/29246>
- Purba, S. F., & Simandjorang, B. M. T. V. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Mendorong Pertumbuhan

- Ekonomi Di Sumatera Utara. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 141–155.
- Putriana, R., & Aji, R. H. S. (2022). Studi Atas Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I Yogyakarta. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8, 31–47.
- Rahmatunnisa, M. (2015). Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 505–522. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Richardson, H. W. (1976). Growth Pole Spillovers: The Dynamics of Backwash and Spread. *Regional Studies*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/09595237600185011>
- Ridwan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Regional* (T. S. Razak (ed.); 1st ed.). Pustaka Puitika.
- Ristabet, H. A. (2018). *Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah>
- Safitri, E., Junaidi, J., & Erfit, E. (2021). Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 141–150. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.10156>
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 739–750. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2606>
- Sidik, M., Hidayat, S., & Ridwansyah, M. (2020). Dampak alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 229–238. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10325>
- Sistara, M., Herlinda, & Nurfitri. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(3), 82–94.
- Sjafrizal. (2008a). *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*. Baduouse Media.
- Sjafrizal. (2008b). *Ekonomi Regional Teori dan Terapan*.
- Sri Hartati, Y. (2019). Analisis Disparitas Wilayah Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.55049/jeb.v10i1.104>

- Sumodiningrat, G. (1999). Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Prespektif Teori dan Implementasi). In *Journal of Regional and City Planning Institut Teknologi Bandung* (Vol. 10, Issue 3, pp. 146–159).
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Syamsuddin, N., Nelly, Rahmi, & Saputra, D. H. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, 2(1), 150–165.
- Tarigan, M. R. . R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikas*. PT Bumi Aksara.
- Tayeb, I., Anwar, C., Suparman, &, Program, M., Magister, S., Wilayah, P., Pascasarjana, P., Tadulako, U., & Program, D. (2022). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2000-2020. *Jurnal Katalogis*, 10(1), 24–34. <http://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/katalogis/index>
- Tiara, A., & Hendarto, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Kedungsepur Tahun 2011-2020. *Diponegoro Journal Of Economics*, 12(3), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.39352>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (A. Maulana & N. I. Sallama (eds.); 11th ed.). Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. Unaradjan, D. D. (2019). Metode penelitian kuantitatif. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 1.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

- Widarjono, A. (2019). Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews. In *Yogyakarta : UPP STIM YKPN* (Edisi 5). UPP STIM YKPN. <http://repository.ut.ac.id/3891/1/EKSI4417-M1.pdf>
- Yadiansyah. (2007). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Periode 1993-2005. *Journal of Economic & Development*, 5(1), 59–78.
- Yuvanda, S., Rasjid, M. R., & Herlin, F. (2023). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 11(2), 90–96. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.310>
- Zohara, L. (2021). *Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. 4(1), 60–69.